

# Pemberian hak pilih bagi TNI

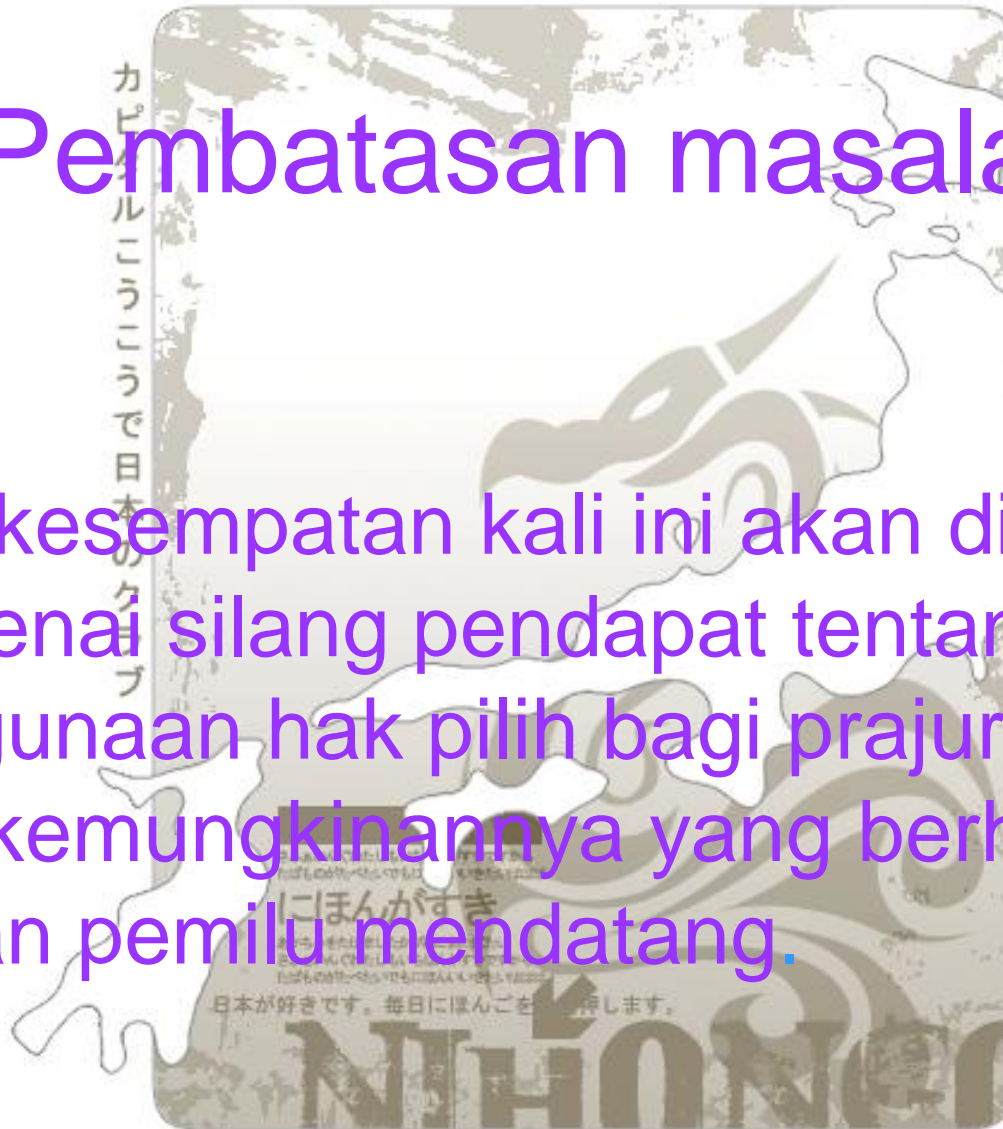


# Latar Belakang

- Penggunaan hak pilih prajurit TNI pada pemilu mendatang diaktualkan kembali di permukaan negeri ini.
- GHal ini masih diperbincangkan untuk mengarah pada kedewasaan berpolitik negara

# Pembatasan masalah

- Pada kesempatan kali ini akan diuraikan mengenai silang pendapat tentang penggunaan hak pilih bagi prajurit TNI serta kemungkinannya yang berhubungan dengan pemilu mendatang.



CAPITAL HIGH SCHOOL'S JAPAN CLUB  
OLYMPIA, WASHINGTON USA

# Hak pilih TNI

- Hak pilih dimiliki oleh segenap warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu, prajurit TNI adalah warga negara yang bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan, hal ini merupakan konsekuensi karena kita menganut sistem demokrasi

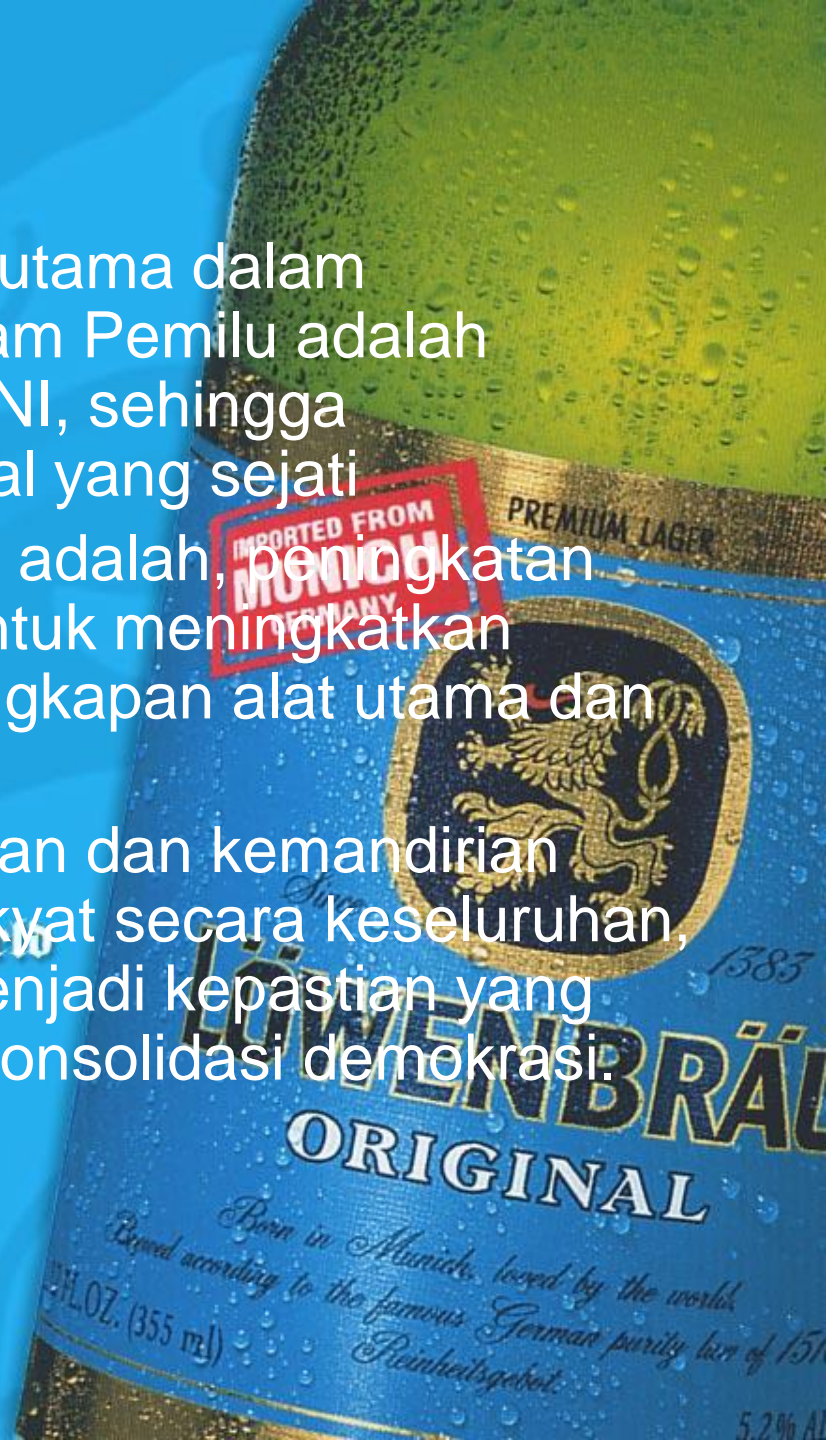




# Kekhawatiran yang Muncul

- Selama ini masih dipahami dalam politik praktis di Indonesia, militer masih merupakan penentu dalam perbatasan politik di Indonesia
- Secara Intitucional reformasi dalam tubuh TNI belum Optimal.
- Kecenderungan kalangan politikus sipil tertentu untuk menarik anggota TNI ke dalam tanah politik sebagai vote getters
- Terdapat perasaan traumatik terhadap pengalaman masa lalu ketika TNI mengambil kebijakan piolitik di Indonesia dengan pendekatan keamanannya (seperti kasus senmanggi, trisakti dll)

- Oleh karena itu bagi TNI syarat utama dalam penggunaan hak pilihnya di dalam Pemilu adalah mempererat proses reformasi TNI, sehingga menghasilkan tentara profesional yang sejati
- Hal yang tidak kalah pentingnya adalah, peningkatan anggaran pertahanan negara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan kelengkapan alat utama dan sistem pertahanan.
- Selain itu diperlukan kedewasaan dan kemandirian politik para politikus sipil dan rakyat secara keseluruhan, tak pelak pembenahan 2 sisi menjadi kepastian yang sulit ditawarkan demi mempererat konsolidasi demokrasi.





# Kesimpulan

- Sebagai konsekuensi negeri ini mengambil sistem demokrasi yang nota bene harus menghormati HAM, salah satunya dalam bidang politik, maka seharusnya TNI mendapat hak yang sama dengan warga negara lain dalam pemilu yaitu hak dipilih dan memilih.
- Tingkat kedewasaan TNI secara Institusional dan pribadi harus lebih dimantapkan.
- Profesionalisme TNI merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum hak pilihnya diberikan.